

Pendekatan *SWOT* dan *AHP* pada Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir (Kasus: Pulomerak -Bojonegara)

Emirhadi Suganda

Departemen Arsitektur FTUI, Kampus UI Depok 16424

Telp. 021-7864512, Fax. 021-7863514

E-mail: emirhadi@eng.ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kebijakan "Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir dalam Pembangunan Berkelanjutan". Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah: Pembangunan kawasan perkotaan pesisir akan berkelanjutan jika mengintegrasikan penataan ruang kawasan darat dan laut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian untuk eksplorasi teori/konsep yang sudah ada dengan cara *pre-scriptif*. Sedangkan metode penelitian yang dipilih adalah berupa gabungan antara penelitian metode kualitatif (ranah makna) dan penelitian metode kuantitatif (ranah fakta). Sebagai wilayah penelitian dipilih Kecamatan Pulomerak, dan Bojonegara Propinsi Banten. Instrumen penelitian yang digunakan adalah *Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT)*, dan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, setelah dilakukan uji dan analisis, ternyata hipotesis yang diajukan terbukti benar. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusunan model kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir Berkelanjutan.

Kata kunci: Penataan ruang, kawasan perkotaan pesisir, *dynamic SWOT*, *AHP* dan pembangunan berkelanjutan

Abstract

This research aims to develop "Coastal Urban Spatial Planning for Sustainable Development" policy model. The hypothesis is that Coastal Urban Spatial Planning will be sustained if there is an integration between spatial planning of land areas and sea areas. The research is exploratory based on prescriptive perspective, combining qualitative research methods (to explore meaning) and quantitative research methods (to explore facts). The research sites include the districts of Pulomerak and Bojonegara, Banten Province. The research applies two instruments, *Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT)* analysis and *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Based on the analysis, the result shows that the hypothesis is accepted. This results of this research could be useful in developing the policy model of Coastal Urban Spatial Planning for Sustainable Development.

Keywords: Spatial planning, coastal urban area, *dynamic SWOT*, *AHP* and sustainable development

1. Pendahuluan

Selama ini pembangunan perkotaan pesisir dilakukan dengan pendekatan sektoral, dengan mengabaikan pendekatan kewilayahan. Pembangunan perkotaan pesisir dilakukan dengan kebijakan pro-daratan, yang masih kental dengan kepentingan kawasan darat. Letak wilayah perkotaan pesisir yang berbatasan di antara darat dan laut, dan adanya keterkaitan serta saling mempengaruhi antara ekosistem darat dan laut, menyebabkan wilayah perkotaan pesisir sangat rentan, karena merupakan muara dari permasalahan yang ada di darat dan di laut. Sumberdaya

perkotaan pesisir Indonesia merupakan pusat biodiversiti laut tropis terkaya di dunia, dimana terdapat 30% hutan bakau dunia; 30% terumbu karang dunia, 60% konsumsi protein berasal dari sumberdaya ikan, 90% ikan berasal dari perairan perkotaan pesisir dalam 12 mil laut dari garis pantai. Ekosistem perkotaan pesisir dapat mengurangi dampak bencana alam seperti tsunami, banjir dan erosi pantai. Sumberdaya perkotaan pesisir penting bagi budaya dan tradisi masyarakat lokal serta media pertahanan-keamanan [2].

Pada kawasan perkotaan pesisir terdapat 140 juta penduduk atau 60% penduduk

Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pesisir dengan lebar 50 km dari garis pantai. Pada tahun 2000, terdapat 42 kota besar dan 181 kabupaten berada di wilayah perkotaan pesisir yang menjadi tempat pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan berbagai aktivitas lainnya. Di kota dan kabupaten ini, terdapat sekitar 80% dari industri Indonesia beroperasi yang memanfaatkan sumberdaya perkotaan pesisir dan membuang limbahnya ke perkotaan pesisir. Sampai tahun 1996, sekitar 26.5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari hasil pemanfaatan sumberdaya perkotaan pesisir dan jasa-jasa lingkungannya [1]. Perkotaan pesisir Pulomerak-Bojonegara, Banten terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Bojonegara, yang mempunyai 18 desa. Jumlah penduduk mencapai 207.952 jiwa, dengan kepadatan penduduk berkisar antara 818 sampai dengan 3.437 jiwa per km². Fungsi kawasan Pulomerak adalah sebagai kawasan transportasi inter moda (pelabuhan ferry, terminal bus, stasiun KA), PLTU dan daerah industri. Sedangkan Fungsi kawasan Bojonegara adalah sebagai pelabuhan peti kemas baru [12].

1.1. Pernyataan Masalah

Kawasan perkotaan pesisir Pulomerak-Bojonegara, adalah suatu kawasan yang cepat mengalami pertumbuhan pembangunan fisik. Namun dampak lingkungan yang diakibatkan di kawasan tersebut, sangat besar sisi negatifnya. Terutama dari segi biofisik, sosial dan ekonomi. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perencanaan yang belum memadai. Disamping itu kesenjangan sosial, kemiskinan merupakan kenyataan yang ada. Upaya-upaya telah banyak dilakukan, namun akibat tekanan jumlah penduduk yang besar (asli dan pendatang), secara totalitas telah terjadi penurunan ekosistem.

Permasalahan yang terjadi adalah pembangunan kawasan Perkotaan Pesisir saat ini, menyebabkan degradasi lingkungan fisik dan sosial, yang mengakibatkan ketidak sejahteraan

masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Pertanyaan penelitian yang timbul dalam rangka penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan pesisir adalah:

- a. Mengapa pembangunan di kawasan Perkotaan Pesisir menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan fisik dan sosial?
- b. Tata Ruang Perkotaan Pesisir yang bagaimana, yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan?

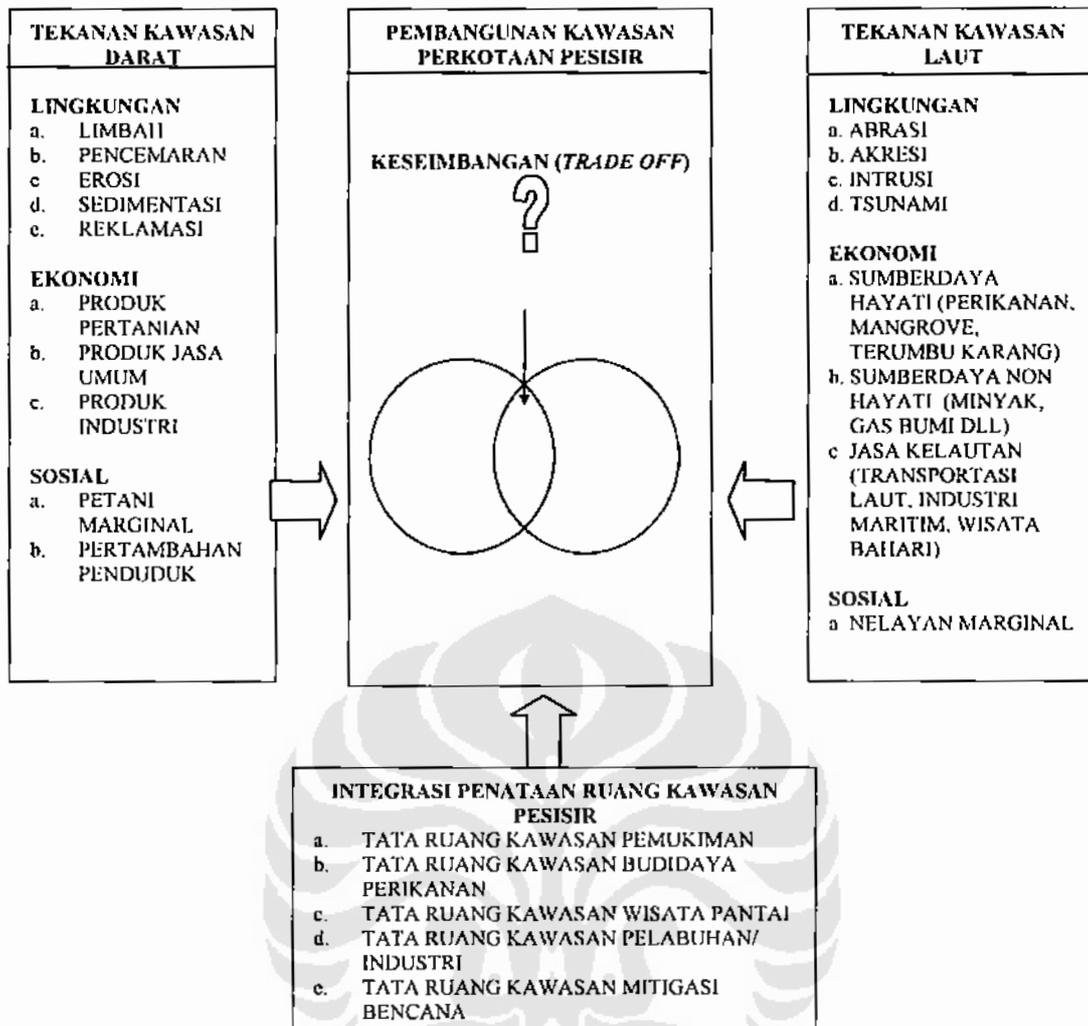
1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kebijakan "Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir dalam Pembangunan Berkelanjutan" Upaya yang ditempuh adalah mengantisipasi tantangan dan yang ada dimasa depan, dalam bentuk:

- a. Menemukan kelemahan pembangunan di kawasan Perkotaan Pesisir saat ini, yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan fisik dan sosial, dengan menggunakan analisis *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*);
- b. Menemukan kebijakan penataan ruang kawasan Perkotaan Pesisir dalam pembangunan berkelanjutan, dengan menggunakan *model AHP* (*Analytical Hierarchy Process*).

1.3. State of the Art Posisi Kawasan Perkotaan Pesisir

Kawasan pesisir mendapat tekanan dari kawasan darat yang mengakibatkan degradasi lingkungan (limbah, pencemaran, erosi, sedimentasi dan reklamasi). Keterbatasan dalam kemampuan dan modal menyebabkan penduduk asli menjadi *out-casting* (kurang mendapat peran) di wilayahnya yang berakibat petani menjadi marjinal [9]. Demikian pula tekanan dari kawasan laut mengakibatkan degradasi lingkungan (abrasi, akresi, intrusi, tsunami).



Gambar 1.

Peta Konflik Pembangunan Kawasan Pesisir Sumber: Diolah dari berbagai data, 2006

Seperti juga petani di daratan, nelayan di laut juga termarginalkan. Bagaimana agar dampak ekologis pada kawasan pesisir sebagai akibat aktivitas dari darat dan laut, merupakan *trade off* yang seimbang.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mengindikasikan terdapatnya celah/*gap* pada teori penataan wilayah/ruang saat ini, yang pada umumnya lebih berdasarkan sisi daratan. Pembelajaran/*lesson learned* menekankan perlu adanya teori dengan pendekatan holistik [3]. Mencakup kawasan darat dan laut yang berbasis pada lansekap ekologi [7]. Teori *Consensus Planning* [4]. Teori pendekatan normatif Von Thunen

sebaiknya dikaitkan dengan adanya unsur partisipasi masyarakat [5]. Disamping itu unsur kearifan lokal (*Local Wisdom*) merupakan aspek yang perlu menjadi pertimbangan [6]. Studi Kepustakaan mencakup: Penelitian Terdahulu, Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir, Teori Perencanaan dan Perkembangan Wilayah, Indikator Pengembangan Kawasan Perkotaan Pesisir. Untuk mengetahui karakteristik pesisir diperlukan pengamatan atas beberapa aspek sebagai berikut: Keberlanjutan lingkungan berupa: morfologi lahan, flora, fauna, perubahan rona lingkungan, kerusakan lingkungan, kendala penggunaan ruang/lahan, dan pengembangan kota. Keberlanjutan ekonomi berupa: karakteristik penduduk,

mata pencaharian, sifat produk, dan jasa usaha. Keberlanjutan sosial berupa: aspek penduduk, kemiskinan dan partisipasi masyarakat [13].

3. Metode Penelitian

3.1. Kerangka Konsep

Daya dukung dalam pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan mempertimbangkan aspek penduduk, tata ruang dan sumberdaya alam. Pada kawasan Perkotaan Pesisir, pembangunan belum berkelanjutan, disebabkan oleh: tekanan pertambahan jumlah penduduk (asli dan pendatang) yang mempengaruhi ketidakseimbangan daya dukung; kemudian tata ruang yang ada belum mengintegrasikan karakter kawasan darat dan laut.

3.2. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dinyatakan, dan menunjukkan hubungan sebab akibat, serta akan diuji kebenarannya, sebagai berikut: Pembangunan kawasan perkotaan pesisir akan berkelanjutan jika mengintegrasikan penataan ruang kawasan darat dan laut.

3.3. Jenis dan Metoda Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan mengembangkan teori/konsep yang sudah ada (*Exploratory Research*) dengan cara *pre-scriptif*. Sedangkan metode penelitian yang dipilih adalah berupa gabungan antara penelitian metode kualitatif (ranah makna) dan penelitian metode kuantitatif (ranah fakta).

3.4. Pemilihan Wilayah Penelitian, Sampel dan Besaran Responden

Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dipilih untuk lokasi daerah yang sudah dikembangkan, karena: (i) Mempunyai permasalahan yang serius dari aspek lingkungan, (ii) Mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, (iii) Mempunyai fungsi heterogen (pelabuhan penyeberangan Merak, stasiun KA, stasiun bis, industri, permukiman dll). Sedangkan Kecamatan

Bojonegara dipilih untuk lokasi yang akan dikembangkan, karena: (i) Mempunyai daerah yang luas yang lingkungan alamnya belum tersentuh, (ii) Mempunyai kepadatan penduduk yang rendah, (iii) Daerah tersebut baru direncanakan untuk dikembangkan (pelabuhan petikemas Bojonegara, industri, permukiman). Jumlah responden dari Kecamatan Pulomerak (wilayah yang sudah berkembang) adalah 97 KK, terdiri atas: (i) Desa Mekarsari: 33 KK, (ii) Desa Tamansari: 32 KK, dan (iii) Desa Margasari: 32 KK. Sedangkan jumlah responden dari Kecamatan Bojonegara (wilayah yang akan berkembang) adalah 95 KK, terdiri atas: (i) Desa Bojonegara: 32 KK, (ii) Desa Margagiri: 32 KK, (iii) Desa Puloampel: 31 KK.

4. Pembahasan dan Analisis

4.1. Uji Hipotesis

Pembangunan kawasan perkotaan pesisir akan berkelanjutan jika mengintegrasikan penataan ruang kawasan darat dan laut. Untuk mengetahui apakah strategi pembangunan di kawasan penelitian sudah sesuai dengan prinsip keberlanjutan, digunakan analisis *SWOT* (*Strength, Weakness, Oportunity, Threat*) dengan melihat aspek internal (kekuatan dan kelemahan) serta aspek eksternal (peluang dan ancaman). Untuk mengetahui apakah kebijakan Tata Ruang di kawasan penelitian menyebabkan pembangunan tidak berkelanjutan karena belum menggunakan integrasi kawasan darat dan laut?, dilakukan analisis dengan instrumen *Analytical Hierarchi Process (AHP)*, melalui pilihan pakar (*Expert Choice*), kemudian peneliti melakukan telaah kebijakan yang ada dan menetapkan kebijakan yang diharapkan dimasa mendatang. Sedangkan untuk mengetahui apakah penataan ruang sudah terintegrasi antara kawasan darat dan laut, dilakukan observasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan Pulomerak-Bojonegara, kemudian dibandingkan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

4.2. Strategi *SWOT*

Strategi adalah tujuan jangka panjang, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumberdaya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut, serta merupakan alat untuk mencapai keunggulan bersaing. Untuk mengetahui apakah strategi pembangunan di kawasan penelitian sudah sesuai dengan dengan prinsip keberlanjutan, digunakan analisis *SWOT* dengan melihat aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan aspek eksternal (peluang dan ancaman). Analisis *SWOT* adalah identifikasi secara sistematis untuk merumuskan strategi kawasan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*), Namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Analisis (lihat lampiran Tabel 1) dilakukan pada Strategi S-O (S1-O2; S2-O3; S3-O1; S3-O4); Strategi S-T (S1-T2; S2-T1; S3-T3; S4-T4); Strategi W-O (W1-O2; W2-O4; W3-O3; W4-O1), dan Strategi W-T (W1-T3; W2-T4; W3-T1; W4-T2).

Kesimpulan *SWOT* yang signifikan dengan permasalahan adalah:

- a. Untuk mengurangi terjadinya degradasi lingkungan, dan kesenjangan ekonomi-sosial, serta untuk memperkecil ancaman bagi kebijakan Tata Ruang yang belum mendukung, maka diperlukan penyempurnaan atas kebijakan Tata Ruang yang ada (Strategi W1-T3)
- b. Untuk memperkecil ancaman bagi kebijakan Tata Ruang yang belum mendukung keberlanjutan, maka infrastruktur pendukung bagi sektor industri dan jasa yang sudah dimiliki seperti fasilitas Terminal Ferry Jawa-Sumatera dan Proyek Pelabuhan Kontainer Bojonegara perlu ditata kembali. (Strategi S3-T3), dengan *law enforcement* atas Keppres No.32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung [11].

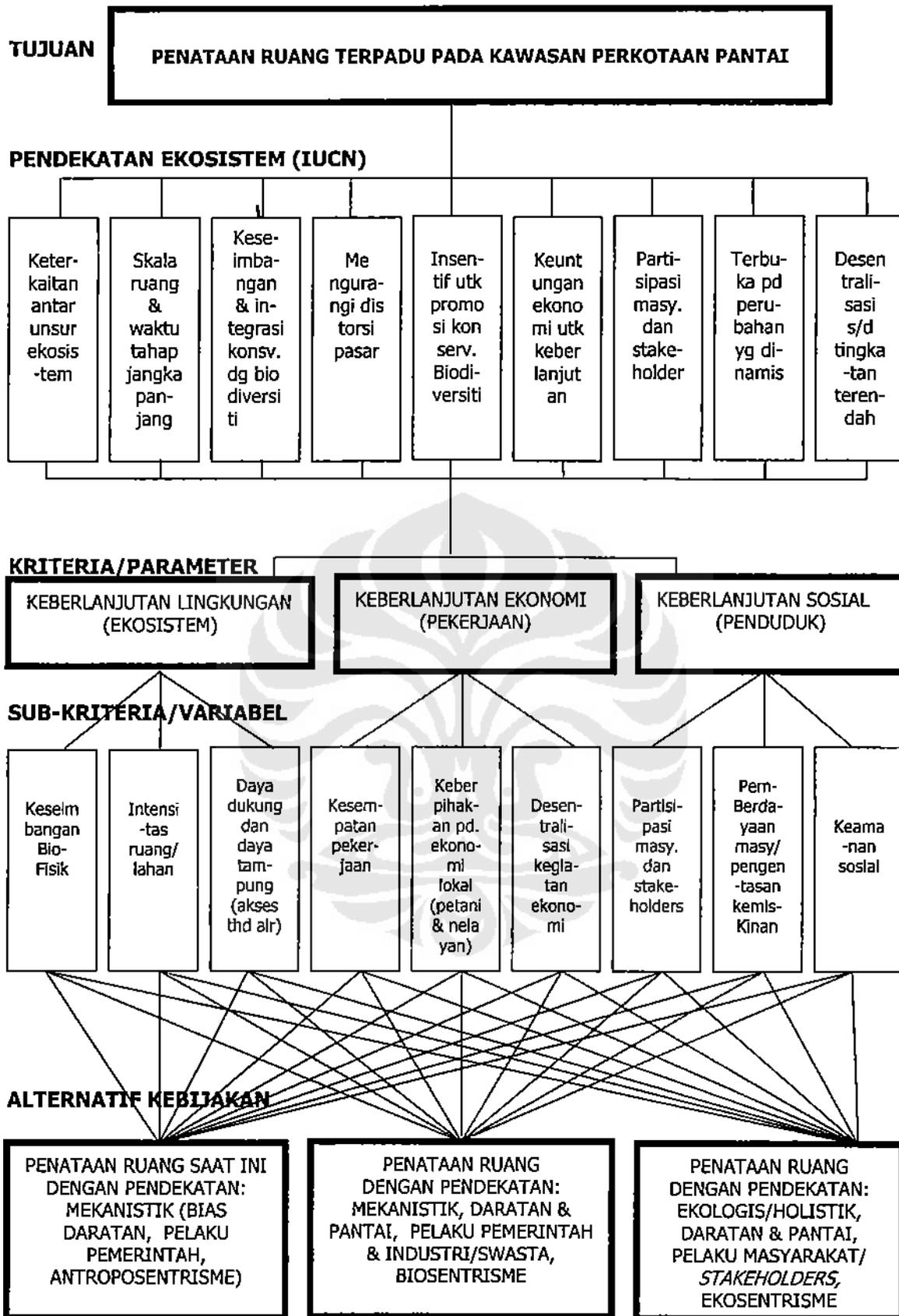
4.3. Kebijakan Penataan Ruang dengan instrumen AHP

Untuk mengetahui apakah kebijakan Tata Ruang di kawasan penelitian

menyebabkan pembangunan tidak berkelanjutan?, dilakukan analisis dengan instrumen *Analytical Hierarchy Process* (AHP), melalui pilihan 15 pakar (*Expert Choice*) berdasarkan keahlian dan keterwakilan. Pendekatan yang menjadi dasar penggunaan AHP yaitu: (i) Dasar pendekatan ekosistem versi *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources/IUCN* [10], (ii) Dasar pendekatan *Ecological Landscape Planning* [8] adalah perencanaan dengan pendekatan ekologis, pada tiga persepektif yaitu: bio-fisik, *society* masyarakat dan ekologi. Beberapa langkah untuk membahas kebijakan dalam Penataan Ruang: (i) identifikasi pada para pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan atas kebijakan Tata Ruang di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, (ii) melakukan seleksi pakar berdasarkan keahlian dan keterwakilan (Pemerintah Pusat/Daerah, Pengusaha, Masyarakat/Akademisi), untuk memenuhi tingkat *Inconsistency Ratio* yang obyektif, dengan kisaran $0,00 \leq r \leq 0,10$, (iii) penyebaran kuesioner AHP. Tahapan analisis data AHP adalah: (i) identifikasi sistem, (ii) penyusunan struktur hirarkhi, (iii) membuat matrik perbandingan/komparasi, (iv) menghitung matrik pendapat individu, (v) menghitung pendapat gabungan, (vi) pengolahan horizontal, (vii) pengolahan vertikal, (viii) revisi pendapat.. Uji konsistensi AHP menunjukkan hasil yang signifikan ($CR=0,004 < 0,01$). Hasil akhir kebijakan publik AHP adalah: Kebijakan Penataan Ruang dengan pendekatan: Ekologis/holistik, darat & laut, dengan pelaku *stakeholders*, ekosentrisme sebesar 38% (*new paradigm*), lebih diutamakan dibanding dengan Kebijakan Ruang dengan pendekatan: Mekanistik, darat & laut, pelaku pemerintah & industri/swasta, biosentrisme sebesar 35% (*bussines as usual, plus*), dan Kebijakan Penataan Ruang Penataan ruang dengan pendekatan: Mekanistik, bias daratan, pelaku pemerintah, antroposentrisme sebesar 27% (*bussines as usual*).

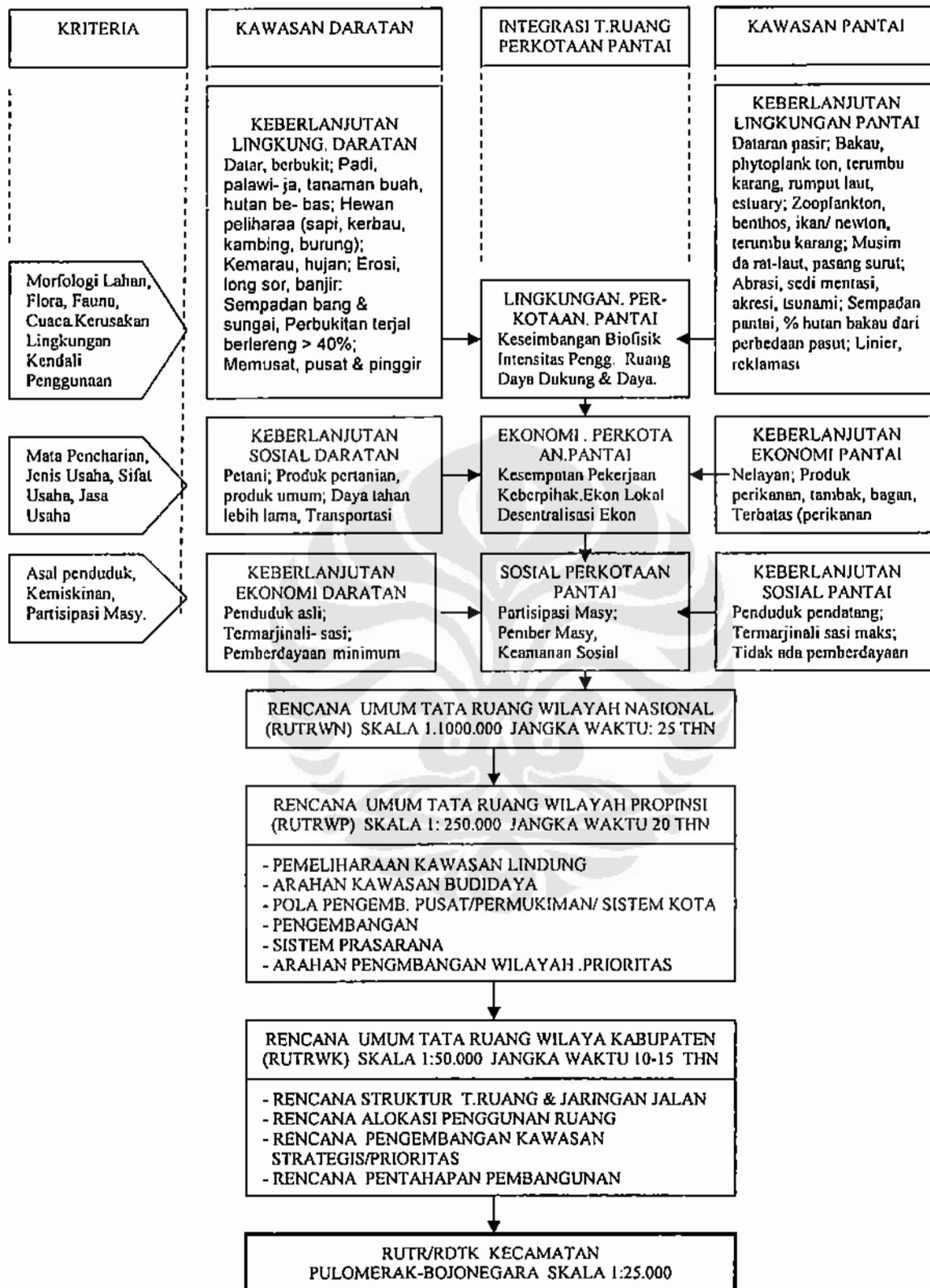
Tabel 1.
Analisis SWOT Potensi Kawasan Pulomerak-Bojonegara
(Sumber: Hasil Penelitian, 2005)

FAKTOR EKSTERNAL	OPPORTUNITY (Peluang)				
	Banten menjadi Propinsi baru	Merupakan wilayah yang menarik bagi investor	Diberlakukannya Otonomi Daerah	Berkembangnya era demokrasi dan keterbukaan	
FAKTOR INTERNAL	1	2	3	4	
STRENGTH (Kekuatan)		STRATEGI S-O			
Letak Lokasi geografis yang strategis	1	1. Letak Lokasi geografis yang strategis, merupakan kekuatan untuk menangkap peluang bagi daya tarik investor (S1-O2)			
Kaya akan Sumberdaya alam (SDA) dan peninggalan budaya	2	2. Kekayaan akan Sumberdaya alam (SDA) dan peninggalan budaya, merupakan kekuatan untuk menangkap peluang diberlakukannya Otonomi Daerah (S2-O3)			
Memiliki infrastruktur pendukung bagi sektor industri dan jasa	3	3. Memiliki infra-struktur pendukung bagi sektor industri dan jasa, merupakan kekuatan untuk menangkap peluang terbentuknya Banten menjadi Propinsi baru (S3-O1)			
Masyarakatnya memiliki keinginan yang kuat untuk membangun dan bangkit dari keteringgalan	4	4. Masyarakat yg memiliki keinginan kuat untuk membangun dan bangkit dari keteringgalan, merupakan kekuatan untuk menangkap peluang berkembangnya era demokrasi dan keterbukaan (S4-O4)			
WEAKNESS (Kelemahan)		STRATEGI W-O			
Terjadinya degradasi lingkungan, dan kesenjangan ekonomi-sosial	1	1. Mengurangi terjadinya degradasi lingkungan, dan kesenjangan ekonomi-sosial, untuk menangkap peluang bagi daya tarik investor (W1-O2)			
Peranserta/partisipasi masyarakat masih rendah	2	2. Meningkatkan peranserta/partisipasi masyarakat yg masih rendah, untuk menangkap peluang berkembangnya era demokrasi dan keterbukaan (W2-O4)			
Produktivitas pertanian dan kelautan masih rendah	3	3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan kelautan yg masih rendah, untuk menangkap peluang bagi diberlakukannya Otonomi Daerah (W3-O3)			
Kualitas SDM masih rendah, kondisi masyarakat miskin	4	4. Meningkatkan kualitas SDM yg masih rendah, dan kondisi masyarakat yg masih miskin, untuk menangkap peluang bagi terbentuknya Banten menjadi Propinsi baru (W4-O1)			
FAKTOR EKSTERNAL	THREAT (Ancaman)				
	Krisis ekonomi yang belum pulih	Kondisi politik keamanan negara yang belum kondusif	Kebijakan Tata Ruang yang belum mendukung	Pengaruh budaya negatif dari luar sebagai akibat wilayah terbuka	
FAKTOR INTERNAL	1	2	3	4	
STRENGTH (Kekuatan)		STRATEGI S-T			
Letak Lokasi geografis yang strategis	1	1. Letak Lokasi geografis yang strategis, merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman kondisi politik keamanan negara yang belum kondusif (S1-T2)			
Kaya akan Sumberdaya alam (SDA) dan peninggalan budaya	2	2. Kekayaan akan Sumberdaya alam (SDA) dan peninggalan budaya, merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman bagi krisis ekonomi yang belum pulih (S2-T1)			
Memiliki infrastruktur pendukung bagi sektor industri dan jasa	3	3. Memiliki infra-struktur pendukung bagi sektor industri dan jasa, merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman bagi kebijakan Tata Ruang yang belum mendukung (S3-T3)			
Masyarakatnya memiliki keinginan yang kuat untuk membangun dan bangkit dari keteringgalan	4	4. Masyarakat yg memiliki keinginan kuat untuk membangun dan bangkit dari keteringgalan, merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman bagi pengaruh budaya negatif dari luar (S4-T4)			
WEAKNESS (Kelemahan)		STRATEGI W-T			
Terjadinya degradasi lingkungan, dan kesenjangan ekonomi-sosial	1	1. Mengurangi terjadinya degradasi lingkungan, dan kesenjangan ekonomi-sosial, untuk memperkecil ancaman bagi kebijakan Tata Ruang yang belum mendukung (W1-T3)			
Peranserta/partisipasi masyarakat masih rendah	2	2. Meningkatkan peranserta/partisipasi masyarakat yg masih rendah, untuk memperkecil ancaman bagi pengaruh budaya negatif dari luar (W2-T4)			
Produktivitas pertanian dan kelautan masih rendah	3	3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan kelautan yg masih rendah, untuk keberlanjutan ekonomi, dengan memperkecil ancaman bagi krisis ekonomi yang belum pulih (W3-T1)			
Kualitas SDM masih rendah, kondisi masyarakat miskin	4	4. Memberdayakan masyarakat dengan peningkatkan kualitas SDM yg masih rendah, kondisi masyarakat yg masih miskin, untuk memperkecil ancaman bagi kondisi politik keamanan negara yang belum kondusif (W4-T2)			



Gambar 2.
Alur Proses AHP (Sumber: Hasil Penelitian 2005)

Tabel 2.
Integrasi Penataan Ruang (Sumber: Hasil Penelitian 2005)



5. Kesimpulan

1. Pembangunan di kawasan Perkotaan Pesisir menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan fisik dan sosial, karena belum mengintegrasikan penataan ruang kawasan darat dan laut, serta pemerintah belum taat asas dalam pengendalian/pelaksanaan pembangunannya.
2. Penataan ruang kawasan perkotaan pesisir jika melibatkan partisipasi dan menampung aspirasi masyarakat, dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
3. Solusi untuk memecahkan permasalahan (degradasi lingkungan fisik dan sosial yang diakibatkan oleh pembangunan yang tidak berkelanjutan, serta tidak terlibatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam penataan ruang, sehingga menyebabkan ketidaksejahteraan masyarakat lokal):
 - a. Penetapan kebijakan baru dalam Penataan Ruang Perkotaan Pesisir
 - b. Penggunaan prinsip Penataan Ruang berkelanjutan di kawasan Perkotaan Pesisir
 - c. Penetapan kriteria Penataan Ruang berkelanjutan di kawasan Perkotaan Pesisir
 - d. Penggunaan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)
 - e. Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
4. Model Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir: Penataan Ruang di kawasan Perkotaan Pesisir saat ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, baik lingkungan, ekonomi maupun sosial. Untuk itu diperlukan konsep baru yang bertitik tolak pada landasan pemikiran bahwa Tata Ruang harus dilakukan dengan pendekatan Lansekap Ekologi, dengan memfokuskan pada keseimbangan biofisik, masyarakat dan ekologi. Pada tataran konsep, maka harus dilakukan integrasi antara kawasan darat dan kawasan laut, serta keberpihakan pada keseimbangan lingkungan, ekonomi masyarakat dan keadilan sosial. Selanjutnya pada pelaksanaannya perlu

dipertimbangkan aspek penduduk (asli dan pendatang), Tata Ruang yang berorientasi pada karakter spesifik lingkungannya. Pada ahirnya keberhasilan penerapan teori Penataan Ruang dengan pendekatan keberlanjutan, ditentukan oleh para pihak sebagai pelaku, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat/*stakeholders*.

Daftar Acuan

- [1] BPS Kabupaten Serang, Statistik Serang 2003. Serang, 2003.
- [2] Departemen Kelautan dan Perikanan, Laporan Tahunan DKP 2005, Jakarta, 2005.
- [3] Heriyanto, Paradigma Holistik, Teraju, Jakarta, 2003.
- [4] Kay and Adler, Consensus Planning, Mc. Graw Hill, New York, 1999.
- [5] Raharjo, Perkembangan Kota, National Press, Jakarta, 2005.
- [6] Sudarsono, Kearifan Lingkungan Untuk Indonesiaku, PPLH Regional Jawa, Yogyakarta, 2006.
- [7] Yokohari, Landscape Ecology Planning. Tsukuba Press. Tsukuba, 2004.
- [8] Ahern, J, Development of Landscape Ecology, Mc Graw Hill Inc, New York, 2004.
- [9] Dahuri, R, Rais, Jacob, Ginting, P.S, Sitepu, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta, 2001.
- [10] IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living. IUCN-UNEP-WWF, 2004.
- [11] Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, 1990.
- [12] Pemda Kabupaten Serang, RUTR Kecamatan Bojonegara, 2001.
- [13] Rais J, Sulistiyo, B, Diamar, S, Gunawan, T, Sumampouw, M. Menata Ruang Laut Terpadu, Pradnya Paramita. Jakarta, 2004.